



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 September 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.52 WIB s.d 15.08 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara
Acara	: Membahas rincian anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA 2019.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos, M.Si
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.52 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah pembahasan lanjutan mengenai rincian anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA 2019.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai rencana rincian kegiatan/kerja dan anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk program kegiatan strategis Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 6 September 2018, sebagai berikut:

Dalam ribuan Rupiah

PROGRAM/ UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2019 *)	KEKURANGAN
Ditjen Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan)	52.994.292.764	40.318.736.335	(12.675.556.429)

*) Selain itu terdapat pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha – *Availability Payment* (KPBU-AP) pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp.5,103 triliun

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan tambahan anggaran sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU Tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program dan rincian kegiatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2019 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan hasil Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setuju rincian kegiatan disusun berdasarkan kebijakan direktif Presiden dan Wakil Presiden, hasil sidang kabinet, hasil kunjungan kerja, Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI secara proporsional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.08 WIB.

Jakarta, 27 September 2018

**DIRJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN PUPR,**


SUGIYARTANTO

KETUA RAPAT,


LASARUS